

## TAJUK RENCANA

### 'Bancakan' Anggaran MBG

**DIPECATNYA** secara mendadak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakil Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya (Selasa 2/6) mengejutkan banyak pihak. Orangpun bertanya-tanya, ada apa di baliknya. Paling gampang menebaknya adalah kasus korupsi. Benar. Hari berikutnya (Rabu 3/6) Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN dan setelah itu menetapkan keti-ganya sebagai tersangka korupsi dan menahannya. Kejagung juga menunjukkan keti-ganya mengenakan rompi oranye dengan kedua tangan diborgol.

Sebagaimana diungkapkan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarif Sulaeman Nahdi, keti-ganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026 (KR, Kamis 4/6). Ketiganya menunjuk yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dijelaskan, dengan kurucan anggaran yang besar, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun, faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara melakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka.

Dengan begitu, yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. "Yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut, di antaranya dimiliki oleh Saudara DH (Dadan Hindayana), Saudara SS (Sony Sanjaya), dan Saudara LP (Lodewyk Pusung)," ungkap Syarif Sulaeman. Selain itu, ketiga tersangka juga diduga melakukan proses pengadaan di BGN, baik barang dan jasa, secara melawan hukum.

Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini memang mempu-

nyai anggaran yang sangat besar. Pada tahun 2025 total anggaran program prioritas nasional ini mencapai Rp 85,27 triliun dan tahun 2026 dinaikkan tiga kali lipat menjadi Rp 268 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN. Program dengan anggaran sangat besar ini memang rawan terjadinya korupsi. Saat ini, yang sudah terindikasinya melakukan korupsi adalah ketiga pimpinan BGN yang akhirnya dicopot dan sekarang mendekam di tahanan Kejagung.

Tetapi apakah hanya berhenti di sini? Apakah para pejabat di bawahnya juga tidak main dengan uang yang sangat banyak itu? Tentu aparat penegak hukum harus menelusurinya lebih jauh. Bukan hanya di lingkup pusat, tetapi juga sampai di daerah. Juga menelusur sampai mitra-mitranya. Apakah anggaran Rp 15.000 per porsi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima? Adakah potongan-potongannya? Atau adakah *cashback* dari para rekanan penyedia makanan kepada para oknum BGN di daerah-daerah? Semua harus ditelusuri sampai tuntas dan diungkapkan secara transparan. Sebab kalau setiap porsi dipotong Rp 1.000 saja untuk *cashback*, maka akumulasi dari setiap penyedia makanan sudah sangat banyak. Apalagi akumulasi secara nasional.

Karena itu para rekanan penyedia MBG juga harus terbuka. Masyarakat yang mengetahui adanya praktik tidak benar terkait pengadaan MBG juga tidak perlu sungkan-sungkan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Saat ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki tatakelola Program MBG. Harapannya, anggaran yang disediakan APBN ini betul-betul sampai kepada sasaran sesuai dengan anggaran yang semestinya. Tidak ada oknum yang mengambil untuk memperkaya diri.

Tentu saja pimpinan baru BGN bisa akomodatif serta menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti juga terjerat kasus korupsi. Kita tidak ingin anggaran ratusan triliun rupiah ini untuk *bancakan* oknum-oknum tertentu. (\*)-f



**UPAYA** Amerika Serikat untuk menaklukkan Iran dan mendikte arah politik Timur Tengah akan kian jauh dari kenyataan. Operasi *epic fury*, tekanan maksimum dan proyek

kebebasan untuk memuluskan langkah Washington membuka paksa Selat Hormuz dengan superioritas militer yang dimiliki, sia-sia saja. Teheran telah mengunci rapat kawasan dan meninggalkan lawannya dalam ilusi kemenangan.

Iran mengukuhkan hegemoninya di Selat Hormuz dengan mengencangkan sabuk pengawasan militer yang membentang dari *Kuh-e Mobarak* di Kota Pelabuhan Jask, Iran hingga selatan Fujairah, UEA. Melalui Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC Navy) atau *Pasdaran*, Teheran mewajibkan setiap kapal tanker atau kapal komersial memperoleh izin melintas atau akan disita dan diserang rundal jelajah antikapal dan drone kamikaze jika mengabaikan peringatan. Iran benar-benar ingin mengakhiri dominasi Amerika di jalur terpenting di Teluk Persia dan hanya memberi izin kepada mitra koalisinya, Tiongkok dan Rusia.

Sikap Iran dianggap sebagai tindakan perang dan ancaman bagi energi dunia. Pemblokiran selat itu mengganggu pasokan minyak dan kepentingan nasional Amerika. Selain itu, isu BBM menjadi komoditas politik yang sensitif karena dapat menggerus pemilih kelas pekerja dan menjadi beban bagi Partai Republik jelang pemilu sela 2026-tahun pemilihan paruh waktu (*midterm elections*). Warga yang menyalahkan petahana (*incumbent*) karena tak mampu mengendalikan inflasi energi. Donald Trump terdesak dalam dilema antara narasi stabilitas ekonomi *America First* yang terancam dan menjaga wibawa di hadapan Iran maupun sekutu globalnya.

Diplomasi mengalami jalan buntu, Washington menolak proposal Iran. Saluran komunikasi antara Iran dan

**Prof Dr Robby H Abror**

Amerika yang dimediasi Pakistan di Islamabad tersumbat, kedua pihak tak dapat memenuhi konsesi. Amerika menuntut agar pengayaan uranium Iran di atas 60% dihentikan total dan menggaransi stabilitas maritim di Selat Hormuz. Adapun Iran mengajukan restitusi ekonomi dan hak pengembangan nuklirnya sebelum membahas deeskalasi militer di Selat Hormuz.

Menariknya, eskalasi konflik AS dengan Iran telah menciptakan fenome-

perdagangan minyak global dan pasokan LNG utama melaluinya. Harga minyak berpotensi meroket hingga melampaui 100 USD per barel. Dampaknya terasa bagi Asia. Infrastruktur digital dunia juga terancam jika Iran memutus kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Eropa dan Asia.

Untuk mengatasi blokade AS, Iran mengalirkan minyak dan logistik militer mereka dengan menerapkan *armada hantu-kapal* tanker Iran mematikan sistem pelacakan otomatisnya agar tidak terdeteksi oleh radar dan satelit Operasi Sentinel AS. Iran dapat mentransfer minyak antarkapal (*ship-to-ship transfer*) di wilayah perairan teritorial negara pihak ketiga yang bersahabat.

Selain mengendalikan Selat Hormuz, Iran juga dapat menutup Bab el-Mandeb melalui proksinya, Houthi Ansarullah, Yaman-untuk mengontrol jalur arteri menuju Terusan Suez dan pasar Eropa. Jika koalisi AS-Israel tetap bersikap keras kepala, Iran akan menciptakan disruptor logistik global melalui blokade titik cekik ganda (*chokepoint dualism*) yang mampu melumpuhkan rantai pasok minyak dunia dan perdagangan internasional.

Iran tetap dalam posisinya untuk membeladiri, pergantian rezim hanya mimpi Trump belaka. Selama Amerika tetap memaksakan kebijakan unilateral dan petualangan intimidatifnya, dunia akan selalu dalam bayang-bayang krisis energi yang makin kritis. (\*)-f

**\*)Prof Dr H Robby Habiba Abror MHum, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.**



GRAFIS JOS

na taktik unik, pengepungan lawan pengepungan balasan (*siege vs counter-siege*). Ayatullah Mojtaba Khamenei siap meladeni sikap Trump yang bangga menyebut pasukannya seperti bajak laut, dapat merampas atau menyerang kapal-kapal lain di Laut Oman sekiranya. Teheran merespons dengan menyebar ranjau laut, mengerahkan kawanan kapal cepat IRGC serta menempatkan baterai rudal pesisir.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dan blokade Laut Oman oleh AS memicu kondisi *double chokepoint* yang dapat memperparah krisis ekonomi dunia. Blokade ini menyebabkan puluhan kapal tanker terjebak di Teluk Persia tanpa jalan keluar, pasokan energi dunia kehilangan sekitar 20% volumenya, padahal seperlima

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.